

# Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko

Tri Aji Pamungkas<sup>1</sup>, Imam Mahdi<sup>2</sup>, Toha Andiko<sup>3</sup>

Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

[triajipamungkas@gmail.com](mailto:triajipamungkas@gmail.com)<sup>1</sup>, [i.mahdi15@yahoo.co.id](mailto:i.mahdi15@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [toha.andiko@iainbengkulu.ac.id](mailto:toha.andiko@iainbengkulu.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemukan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Relevansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wilayah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika prosedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Sidang Keliling, Pengadilan Agama.

## Abstract

This study aims to determine the differences in procedures for the settlement of divorce cases in the Arga Makmur Religious Court and through the circuit court in Mukomuko District, and to find out the application of legal certainty and effectiveness in the trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko District in the view of positive law and Islamic law. This type of research is field research with a normative juridical approach. Data collection techniques are interviews and documentation. While the data analysis technique that is used is an inductive thinking framework, namely the way of thinking by drawing conclusions from specific data. The results of this study are: 1) Differences in procedures for the settlement of divorce cases in the Arga Makmur Religious Court and through the mobile court in Mukomuko District, namely in the procedure for implementing the circuit court settlement of cases heard at the village hall in the applicant's area, while in terms of cost and time the trial did not find a difference and the settlement of divorce cases through trials in general at the court office; 2) The application of legal certainty and the effectiveness of the circuit trial of the Arga Makmur Religious Court in Mukomuko Regency in the view of positive law and Islamic law is the effectiveness of the settlement of divorce cases through the circuit court system by the Arga Makmur Religious Court in its efforts to help the poor to be effective only in terms of travel time and transportation costs alone, for implementation procedures and others remain the same no differences are found such as settlement of divorce cases through trials in general at the court office. The relevance of the policy system for resolving divorce cases in Indonesia is that the circuit courts in the context of divorce cases are not appropriate, because basically divorce is prohibited. And if the divorce procedure is facilitated, more people in Indonesia will divorce.

**Keywords:** Legal Certainty, Mobile Courts, Religious Court.

## Pendahuluan

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 1974), Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun sebelum menikah pasangan suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.

Di negara Indonesia perceraian diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan diluar agama Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 membagi sebab-sebab putusannya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni : a) karena kematian salah satu pihak; b) perceraian; dan c) putusan pengadilan.

Sebagai lembaga publik di era reformasi birokrasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terutama Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Arga Makmur dituntut untuk

mengubah pola pikir, sikap, budaya dan perilaku (mind set dan culture set) untuk memanfaatkan segala kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satu wujud untuk menciptakan pelayanan yang baik, benar dan tepat dalam rangka Access to Justice itu adalah dengan dilaksanakannya sidang keliling.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luartempat kedudukan gedung Pengadilan dan lambentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Sasaran sidang keliling adalah masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kota atau yang memerlukan waktu dan biaya untuk mencapai gedung Pengadilan. Pelaksanaan sidang keliling tersebut sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2 : 185, sebagai berikut yang artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Landasan pelaksanaan sidang keliling adalah UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sejalan dengan amanat UUD 1945 tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan tentang sidang keliling antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Peraturan lainnya adalah Keputusan Ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010. Kemudian tahun 2013 dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Peradilan Agama. Yang terakhir Pasal 42 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan, yang menyatakan SEMA No. 10 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Namun dari semua pedoman pelaksanaan sidang keliling tersebut belum ada yang mengatur hukum acara sidang keliling secara khusus, penyelesaian perkara dilaksanakan dengan hukum acara seperti pada sidang di gedung Pengadilan.

Adapun tujuan sidang keliling dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berpekar di Pengadilan Agama, namun implikasi sidang keliling secara tidak langsung menambah angka perceraian karena masyarakat beranggapan penyelesaian perkara semakin dipermudah, padahal maksud diadakannya sidang keliling tidaklah demikian. Menurut Wahyu Widiani, sidang keliling ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang hukum keluarga baik status pernikahan, perceraian maupun status anak.

Rangkaian kegiatan sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Arga Makmur bukan hanya bersidang, tetapi juga menerima perkara bagi para pencari keadilan yang ingin berperkara dapat mendaftar kepada petugas yang ditunjuk pada sidang keliling tersebut. Secara teori menerima perkara pada sidang keliling sepertinya mengabaikan azas hukum acara di pengadilan, karena dalam menerima perkara pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Sedangkan secara praktek menerima perkara pada sidang keliling adalah salah satu usaha pengadilan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk mempermudah masyarakat itu sendiri ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kendala kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi terutama di Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam ?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

### Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner) dan analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. Serta bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.

### Pembahasan

#### Perbedaan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur dan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Kabupaten Mukomuko

##### 1. Prosedur pelaksanaan

Dalam hal prosedur pelaksanaan sidang keliling sebenarnya tidak ada perbedaan dengan prosedur pelaksanaan perceraian pada sidang umumnya, namun pada prosedur penyelesaian perkara pada sidang keliling prosedur penyelesaian perkara terlihat lebih diminimalkan dan dipercepat dengan menimbang dan memperhatikan biaya operasional dan waktu. Lokasi pelaksanaan biasanya jauh dari Pengadilan Agama Arga Makmur dengan dipusatkan di kantor Camat Ipuh, sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berikut ini :

“Kalau sidang keliling itu, sidang yang bukan di tempat yang disediakan pengadilan yaitu di ruang sidang pengadilan yang ada dan sidang dilaksanakan di tempat tertentu, ini merespon dari masyarakat kita yang sangat membutuhkan dan jauh dari pengadilan, dan ini sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung dan ada alokasi anggarannya untuk trans-

portasi bagi petugasnya. Sehingga dengan pertimbangan biaya operasional dan waktu maka penyelesaian perkara sidang keliling dapat lebih dioptimalkan penyelesaiannya. Masyarakat tetap mendaftarkan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Makmur kemudian sidangnya di Kantor Camat Ipuh. Sebenarnya penyelesaian perkara perceraian dalam sidang keliling ini kurang sesuai, sebab hakim tidak bisa memeriksa lebih maksimal di persidangan sehingga terkesan perkara diputus dengan tergesa-gesa, padahal tidak demikian”.

## 2. Perkara

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur cukup tinggi jumlahnya dari tahun ke tahun. Namun, dalam hal perkara perceraian yang dilaksanakan melalui sidang keliling tidak begitu banyak jumlahnya, mengingat sidang keliling ini kurang sesuai dalam hal penyelesaian perkara perceraian. Ketua Majelis dalam sidang keliling ini mengakui bahwa perkara perceraian yang ditangani melalui sidang keliling di Kantor Camat Kecamatan Ipuh jumlahnya sedikit. Berikut hasil wawancara:

“Angka perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur meningkat dari tahun ke tahun. Untuk pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling sebanyak 23 perkara saja dan didominasi oleh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Sebenarnya dalam melaksanakan perceraian melalui sidang keliling kurang pas karena tidak mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai, tapi tetap kita laksanakan dan jika masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara dapat diterima, namun sidangnya belum tentu dilaksanakan di Mukomuko. Demikian juga untuk pemeriksaan perkara dalam pelaksanaan sidang keliling ini dirasa kurang maksimal, karena terbatasnya waktu”.

## 3. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur biasanya memakan waktu cukup lama, dari awal pendaftaran hingga putusan dibacakan. Akan tetapi mengenai cepat atau lambatnya penyelesaian perkara disesuaikan dari bobot persengketaannya itu juga berlaku pada penyelesaian perkara melalui sidang keliling. Hakim Ketua Majelis dalam sidang keliling di Kecamatan Ipuh menjelaskan bahwa perkara yang ditanganinya cepat selesai karena salah satu pihak tidak hadir atau diputus secara verstek. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian itu pada umumnya tergantung dari bobot persengketaannya. Untuk waktunya sendiri tidak tentu, jika kedua belah pihak hadir maka akan diupayakan dulu mediasi, biasanya sidang ditunda dan sidang selanjutnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga

Makmur. Apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat/Pemohon hadir sedangkan Tergugat/Termohon tidak hadir sedangkan telah disampaikan panggilan sidang kepadanya, maka perkara dapat diputus secara verstek jika memenuhi syarat serta bukti-bukti yang cukup. Maka waktu penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat dan bisa hanya satu kali sidang”.

“Perkara perceraian pada sidang keliling biasanya lebih cepat diselesaikan/diputus jika para pihak dalam hal ini Tergugat/Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan diikuti dengan bukti-bukti yang cukup, maka perkara akan diputus pada hari itu juga sesuai dengan azas hukum perkara cepat.”.

## 4. Biaya

Panjar biaya perkara perceraian telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius tempat tinggal pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Dalam berperkara para pihak berperkara tidak hanya membayar biaya perkara saja melainkan banyak hal yang harus dikeluarkan, seperti biaya transportasi, saksi dan lain-lain. Namun, dengan adanya sidang keliling ini sangat membantu mengurangi panjar biaya tersebut. Berikut penuturan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur terkait panjar biaya perkara sebagai berikut:

“Sangat membantu sekali bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, terutama biaya transportasi menuju kantor pengadilan itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan biaya transportasi menuju kantor pengadilan lebih besar dari biaya panjar perkaranya itu sendiri. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lubuk Pinang, biaya transportasi menuju kantor pengadilan tidak cukup Rp. 100.000,- belum lagi jika harus membawa saksi, nah ini sangat membebani mereka. Dengan adanya sidang keliling ini sangat efektif dari segi biaya, karena sangat membantu masyarakat yang ekonominya masih di bawah rata-rata atau dengan kata lain dapat mengurangi sedikit beban biaya pencari keadilan dalam berperkara”.

## **Penerapan Kepastian Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam**

### 1. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Hukum Positif

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pa-

da bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Efektifitas (hasil guna) diletakkan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekananannya di samping pada hasil yang ingin dicapai juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan. Jadi, terdapat perbedaan antara efektifitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektifitas dan efisiensi yaitu efektifitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur, penulis mengukurnya pada 4 (empat) aspek yang berbeda, diantaranya aspek prosedur pelaksanaan, perkara, waktu, dan biaya. Untuk menguraikan 4 (empat) aspek objek sasaran tersebut, penulis membahasnya secara berurutan.

#### a. Prosedur pelaksanaan

Mengenai cara penyelesaian perceraian, telah diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131. Sebagaimana bunyi dari pasal di atas, bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatan dan permohonannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Tata cara perceraian di pengadilan pun dilakukan secara berurutan, antara lain: 1) sidang pertama; 2) proses perdamaian; 3) perubahan atau pencabutan gugatan; 4) pembacaan gugatan; 5) jawaban tergugat; 6) putusan sela; 7) replik pemohon/penggugat; 8) duplik termohon/tergugat; 9) pembuktian; 10) konklusi/kesimpulan para pihak; 11) tahap putusan hakim; 12) penawaran upaya hukum, dan 13) eksekusi.

Jika hal tersebut di atas dikategorikan dalam kategori efektifitas, maka prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling ini bersifat aktif, dalam artian ditemukan adanya suatu perubahan yang dinamis untuk menimbulkan aturan baru dalam pelaksanaannya walaupun menyalahi hukum acara. Sedangkan sesuatu dikatakan efektif jika usaha atau kegiatan tersebut dapat dan/atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi, dalam kenyataannya prosedur persidangan dan administrasi sidang keliling yang telah berlangsung di Pengadilan Agama Arga Makmur memang menunjukkan suatu upaya baru, namun aturan-aturan tersebut tidak tertulis secara nyata dan hanya menjadi aturan dalam lingkup Pengadi-

lan Agama Arga Makmur saja tidak tertulis secara jelas dalam suatu perturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### b. Perkara

Aspek kedua adalah mengenai perkara yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur menangani hampir 800 lebih perkara perceraian setiap tahunnya. Padahal Pengadilan Agama Arga Makmur telah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Bahkan dari sekian banyak perkara perceraian yang diterima, pemohon/penggugatnya berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan Agama setempat, sehingga menyulitkan mereka untuk datang ke kantor pengadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pengadilan Agama Arga Makmur melaksanakan sidang keliling guna membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, secara umum para informan mengakui bahwa perkara yang ditangani melalui sidang keliling ini jumlahnya masih sedikit sehingga mempercepat proses pelaksanaan persidangan. Dalam kaitannya dengan kategori efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling dalam perihal jumlah perkaranya, penulis mengkategorikannya sebagai responless atau kurangnya respon dari masyarakat untuk mengikuti sidang keliling perkara perceraian. Akan tetapi, salah seorang informan mengatakan sebenarnya untuk sidang keliling perkara perceraian kurang sesuai karena pengadilan tidak mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai karena adanya sidang keliling, akan tetapi agenda ini tetap dilaksanakan untuk membantu dan meredakan beban masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika banyak mendapatkan respon dari penggunanya. Semakin banyak respon yang diterima, semakin baik pula kegiatan tersebut, begitu pula sebaliknya semakin sedikit respon yang diterima, maka semakin kurang diminati kegiatan tersebut. Ini terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Ipuh. Walaupun salah satu Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur mengatakan sidang keliling kurang sesuai untuk perkara perceraian, untuk kategori efektifitas, penulis menilainya sebagai responlies yakni kurang mendapat respon.

#### c. Waktu

Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu menyelesaikan tugas atau perkara, proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permoho-

nan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh Panitera di pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dan gugatan permohonan tersebut.

Secara umum, para Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang berhasil diwawancarai mengatakan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara perceraian disesuaikan dengan bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi syarat dan rukun perceraian maka perceraian akan cepat diselesaikan, begitu pula sebaliknya salah satu hakim mengatakan lebih rinci, yaitu idealnya satu perkara perceraian diselesaikan dalam tiga kali sidang. Dalam hal ini penulis mengkategorikannya sebagai inovatif transformatif, karena keadaannya tidak tetap dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Transformatif di sini diartikan tak tetap, berubah-ubah bentuknya.

Karena dalam pelaksanaannya, sidang keliling merupakan inovasi baru yang diberikan Pengadilan Agama Arga Makmur kepada warganya dalam menyelesaikan perkara dan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi warga sekitarnya. Dalam hal ini apabila penulis mengkaitkannya dengan suatu program pelatihan, pada umumnya suatu program pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan peserta. Manfaat bagi peserta pelatihan dapat mencakup pembelajaran, keahlian dan perilaku baru, sedangkan manfaat bagi perusahaan dapat mencakup peningkatan penjualan dan peningkatan kepuasan konsumen.

Di sini sidang keliling juga telah dikatakan efektif karena dari program ini memberikan manfaat bagi pelaksana dan pengguna jasa. Manfaat bagi pengguna jasa sendiri berupa kecepatan proses berperkara dan lokasi lebih dekat, sedangkan manfaat bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah memberikan suatu pelayanan publik yang profesional yang efektif, karena efektif di sini lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Bila jasa/layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan begitu pula sebaliknya bila layanan yang diterima lebih rendah dari apa yang diharapkan, maka kualitas akan dipersepsikan buruk.

#### d. Biaya

Aspek selanjutnya ialah mengenai panjar biaya perkara, berdasarkan penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai informan bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling

ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor pengadilan, adapun pelaksanaannya dilaksanakan di kantor Kecamatan Ipuh. Mengenai panjar biaya perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius para pihak. Rata-rata biaya perkara aktual adalah Rp. 340.000,- akan tetapi rata-rata uang panjar yang diminta oleh Pengadilan Agama adalah Rp. 420.000,-. Pengadilan menentukan besarnya uang panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak pemohon/penggugat dalam perkara perdata.

Oleh sebab itu, mengenai biaya perkara dalam sidang keliling masih bersifat pasif untuk kategori efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasif ialah tidak aktif, tidak giat dan diam. Dalam hal biaya perkara dalam sidang keliling pun tidak ditemukan perbedaan dengan biaya perkara dalam persidangan pada umumnya, sehingga belum ditemukan adanya motivasi baru dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikategorikan bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikatakan efektif hanya dari segi biaya transportasi dan waktu tempuh perjalanan saja.. Jika dalam sidang keliling dibatasi dua kali sidang dengan jarak sampai satu bulan mengakibatkan kurang maksimalnya pertimbangan. Karena jangka menunggu Tergugat/Termohon cukup singkat sehingga kesempatan untuk hadir di persidangan juga terlalu pendek. Idealnya sidang minimal dilakukan tiga kali, agar pertimbangan hakim lebih matang.

#### 2. Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Hukum Islam

Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya ke pada salah satu kaidah fikih yang ada. Dengan menguasai kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Dengan penguasaan kaidah tersebut maka hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran. Metode fikih yang sering dipakai dalam menetapkan suatu hukum adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan ini sebagai acuan utama penetapan hukum Islam khususnya yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang me-

muat 3 pembahasan yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Teori masalah mursalah adalah perolehan ke-manfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia); dan hal itu adalah tujuan pembentukan syari'at. Masalah mursalah yaitu masalah yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kadang-kadang nash syari'ah ada yang memandang hukum untuk mencari kemaslahatan. Hal ini terdapat pada bagian peristiwa dan kejadian. Maka hal ini akan menunjukkan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan dalam pandangan Allah.

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Namun, akses masyarakat ini kerap terhambat oleh dua faktor, yakni biaya perkara yang tinggi dan jarak gedung pengadilan yang jauh dari masyarakat. Ada banyak sarana yang dapat dipersiapkan guna memuaskan rasa keadilan masyarakat. Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya ada 7 (tujuh) sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

- a. Susunan peradilan dengan yuridiksi yang berbeda-beda, karena keberagaman peradilan dengan berbagai yuridiksi sangat membuka akses masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan.
- b. Kedudukan pengadilan dan hakim yang merdeka dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan atau pihak lain, karena hal demikian dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang.
- c. Proses peradilan yang transparan dan persidangan yang terbuka untuk umum.
- d. Penerapan merit system di peradilan untuk mencegah ketersesatan peradilan dan peningkatan kualitas hukum dan putusannya.
- e. Peradilan Cuma-Cuma (prodeo) dan tersedianya bantuan hukum.
- f. Penyediaan fasilitas yang memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi peradilan dan perkara.
- g. Percepatan penyelesaian perkara serta mengurangi penumpukan perkara.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Arga Makmur adalah dapat mewujudkan maslahat pada kehidupan masyarakat dan ketentuan hukumnya. Tidak ada satupun maslahat hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam (syari'ah) selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia dan menawarkan tuntutan hidup yang berkeadilan. Hukum Islam (syari'ah) senantiasa memperhatikan realisasi maslahat bagi segenap hamba-Nya. Jelaslah bahwa maslahat menjadi peran vital bagi Hukum Islam

(syari'ah) sehingga senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya menjadikan Hukum Islam (syari'ah) tetap up to date bagi segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang tinggal jauh dari lokasi gedung pengadilan. Masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses hukum. Dalam Islam membantu dan memudahkan umat manusia sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Salah satu implementasi dari makna kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang lain. Setiap orang mesti menghormati harkat dan martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pribadi ini akan mengarah pada terjalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.

Dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan sidang keliling hukumnya mubah (boleh) karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan pelaksanaan sidang keliling untuk kedepannya akan terus dilaksanakan tentu saja dengan anggaran yang telah ditentukan oleh DIPA Mahkamah Agung RI. Hukum Indonesia mensyaratkan setiap perceraian diselesaikan oleh Pengadilan Agama bagi umat muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim agar perceraian tersebut sah. Karena itu, perkara perceraian wajib diajukan ke hadapan pengadilan di Indonesia supaya perkawinan tersebut diakhiri secara sah. Jika hukum Indonesia mewajibkan seluruh perceraian diselesaikan di hadapan pengadilan Indonesia, maka seluruh warga Indonesia yang bercerai harus dapat membawa perkara mereka ke pengadilan terlepas seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa cara penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling akan sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk sebagai kasus ringan seperti itsbat nikah, sidang keliling merupakan proses yang tepat dan efektif. Adapun mengenai perkara perceraian, sebenarnya sidang keliling kurang sesuai, karena tidak mungkin penyelesaian perkara perceraian dapat diselesaikan hanya dalam dua kali sidang. Walaupun demikian, masyarakat lebih puas dengan kinerja mekanisme sidang keliling daripada kinerja di kantor pengadilan. Kinerjanya juga dilaporkan memberikan tingkat kepuasan kepada warga masyarakatnya yang lebih tinggi, yaitu sekitar 70% untuk penyelesaian perceraian melalui sidang keliling, dan 30% untuk penye-

lesaian perceraian di kantor pengadilan. Pada dasarnya sidang keliling merupakan suatu program baik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin, akan tetapi akan berdampak buruk jika diberikan untuk sesuatu yang pada dasarnya telah dilarang. Lain halnya dengan perkara itsbat nikah, sidang keliling akan berdampak baik untuk memproses perkara itsbat nikah. Untuk itu, para pelaksana sidang keliling khususnya Pengadilan Agama untuk tetap menjaga konsep perceraian dengan tidak memudahkan dalam memberikan keputusan.

## Kesimpulan

Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko yaitu terdapat perbedaan dari aspek tempat disidangkannya perkara yakni di kantor kecamatan di daerah tempat pemohon, dari aspek waktu penyelesaian perkara, dan dari aspek prosedur pelaksanaan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan dari segi biaya dan hukum acara yang digunakan tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan.

Penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam yaitu efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upayanya membantu masyarakat miskin dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Adapun relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia adalah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang akan bercerai. Akan tetapi, jika dilihat dari salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sidang

keliling telah memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan kebaikan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari gedung pengadilan.

## Daftar Pustaka

- A. Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dewi, Gemala, et.al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamid, Zuhri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008.
- Kansil, CST., dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: tp, 2009.
- M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Kusmayanti Hazar, dkk, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No.2, Surabaya : Airlangga University Press, 2005).
- Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muslim, dkk, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 6 Desember 2018.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t505fe18ec122d/sidang-kelilingpengadilan-agama-melegakan>, akses 12 Februari 2017.
- Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, wawancara tanggal 8 Desember 2018.
- Susilo Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 8, Penerjemah Mohamad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.